



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112
Telp. 08111440117, email : bpbdpurwakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan Kinerjanya, setiap akhir Tahun Anggaran Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari



HERYADI ERLAN W. D., S.STP
Kepala Pelaksana BPBD Purwakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja keuangan, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Melayani Masyarakat. Hasil Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak serta Ridha Allah SWT. Demikian Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


HERYADI ERLAN WIBISANA DJUHAYAT, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19760505 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN PURWAKARTA	2
A. TUGAS	2
B. FUNGSI	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN PURWAKARTA	3
1.4 KOMPOSISI PEGAWAI BPBD KABUPATEN PURWAKARTA	5
1.5 ASPEK STRATEGIS BPBD KABUPATEN PURWAKARTA	8
A. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	8
B. PROGRAM	9
C. KEGIATAN	10
D. ANGGARAN TAHUN 2023	11
1.6 PELAYANAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA	12
1.7 LANDASAN HUKUM	13
1.8 SISTEMATIKA LAPORAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2018-2023	16
A. VISI DAN MISI	17
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	17
C. INDIKATOR KINERJA	20
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	23
A. RINGKASAN KINERJA	24
B. URAIAN KINERJA	30
3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	35
A. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA	35
B. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	36



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL.....	36
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	37
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	39
BAB VI PENUTUP	43
4.1. PERMASALAHAN.....	45
4.2. SOLUSI	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai BPBD Pejabat Struktural dan Staf
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pelatihan Penjenjangan
Tabel 1.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 1.7	Rincian Anggaran Program
Tabel 1.8	Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 3.1	Skala Nilai peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis IKU BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 3.5	Realisasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023
Tabel 3.6	Ringkasan Evaluasi Renja BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 3.7	Realisasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2023
Tabel 3.8	Realisasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023

Tabel 3.9	Realisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2023
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Tahun 2023
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023 BPBD Kabupaten Purwakarta dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.13	Data Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Tahun 2023
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Tahun 2023
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purwakarta
- Gambar 1.2 Komposisi SDM BPBD Kabupaten Purwakarta
- Gambar 2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Purwakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Indikator Kinerja Bpbd Kabupaten Purwakarta
Lampiran II	1. Indikator Kinerja Sekretaris BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 2. Indikator Kinerja Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 3. Indikator Kinerja Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 4. Indikator Kinerja Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Lampiran III	Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Lampiran IV	Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Perbulan)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta berperan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditargetkan setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kebencanaan meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam melaksanakan Perannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 2 Sasaran Program melalui 12 kegiatan pada Tahun 2023. Sebagaimana yang telah tertuang pada Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Purwakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 2 Sasaran Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penanggulangan Bencana. Sedangkan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana adalah (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (9) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; (10) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; (11) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan (12) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Laporan Kinerja ini menyajikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target perjanjian Kinerja 2023 antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah dan Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Purwakarta.

- a. Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	persen	100	97.81	97.81	Sangat Tinggi

Sumber: Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Capaian Sasaran Strategis IKU

BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	7
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	89.05	Tinggi
		Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatkan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	89.05%	89.05%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			100%	97.81%	97.81%

Sumber: Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Rata-rata capaian kinerja (%) 97.81
Predikat kinerja SANGAT TINGGI

- a) Faktor Pendukung Capaian Target Kinerja Tahun 2023, yaitu:
- 1) Pencapaian kinerja difokuskan pada indikator yang mendorong capaian program perangkat daerah.
 - 2) Pagu anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendorong capaian program.
 - 3) Pandemi covid-19 sudah melandai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali normal.
- b) Faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:
- 1) SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi.
 - 2) Penyusunan perencanaan dan pagu anggaran masih belum optimal.
 - 3) Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana.

b. Capaian Keuangan BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai berikut.

Anggaran dan Realisasi Keuangan
Berdasarkan Sasaran Program Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.982.049.608,00	4.436.452.580,00	89,05
2.	Program Penanggulangan Bencana	1.434.850.456,00	1.258.332.600,00	87,70
JUMLAH TOTAL		6.416.900.064,00	5.694.785.180,00	88,75



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta bentuk akuntabilitas kepada publik yang berdasarkan pada reformasi birokrasi, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja instansi pemerintah terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2023 serta sebagai wujud keterbukaan informasi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu pelaporan kinerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah Dearah Kabupaten Purwakarta yang memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh kegiatannya dari tahapan penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja sampai pemanfaatan informasi kinerja yang bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN PURWAKARTA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe B di pimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Harian oleh Pejabat Esselon III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta di bentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka terbitlah Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. TUGAS

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. FUNGSI

BPBD Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan penanggulangan bencana.
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pelaksanaan Administrasi pemerintahan perangkat daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 162 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi berikut.

1. Fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian.
2. Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

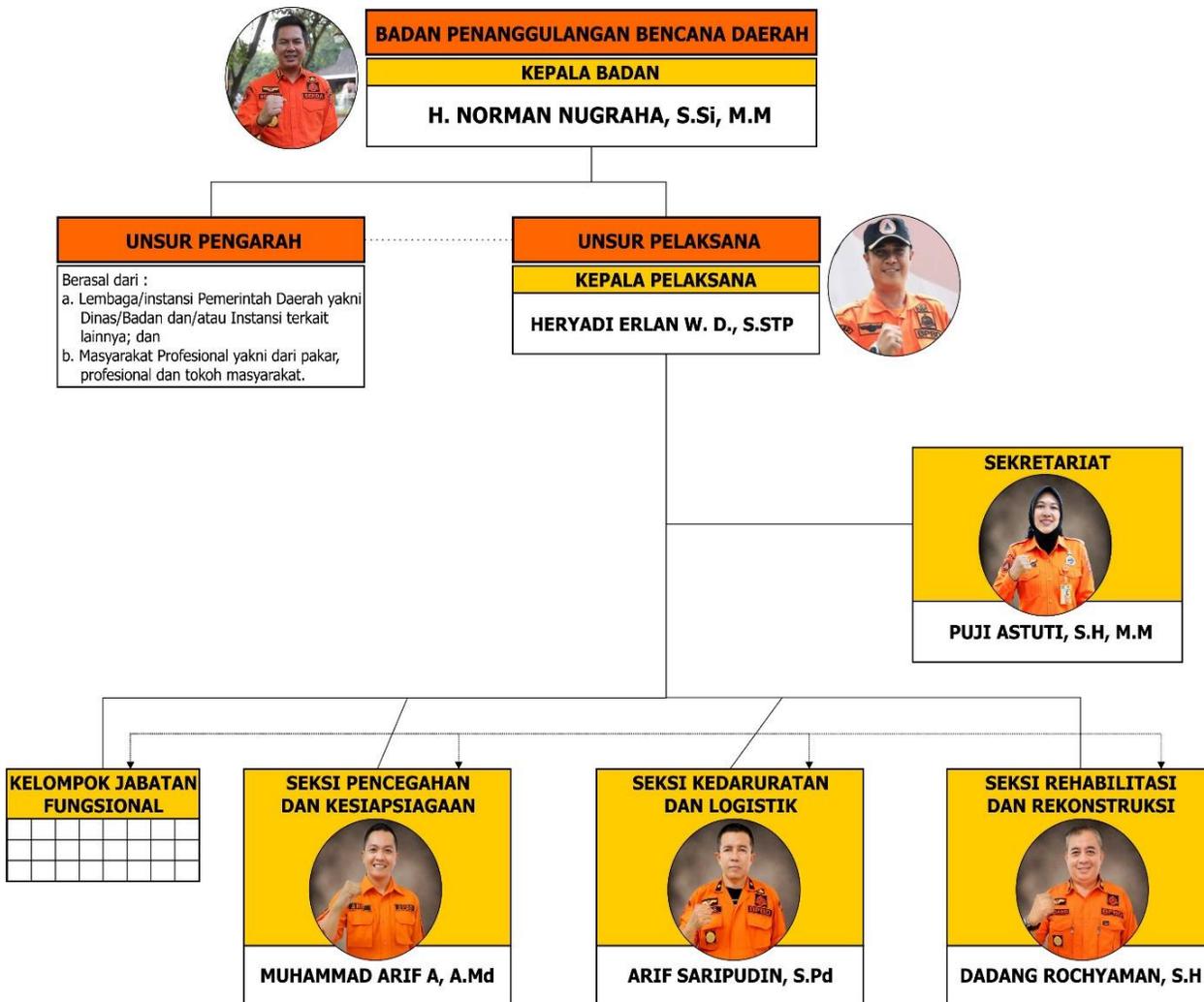
1.3 STRUKTUR ORGANISASI BPBD KAB. PURWAKARTA

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Struktur organisasi Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta disajikan dalam **Gambar 1.1**.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purwakarta



Sumber: Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Berdasarkan **Gambar 1.1** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah Tipe B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta di pimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana Harian oleh Pejabat Esselon III, dengan susunan sebagai berikut.

1. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah Secara ex-Officio
2. Unsur Pengarah
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni Dinas/Badan dan/atau instansi terkait lainnya
 - b. Masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat

3. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretaris
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - e. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - f. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.4 KOMPOSISI PEGAWAI BPBD KABUPATEN PURWAKARTA

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

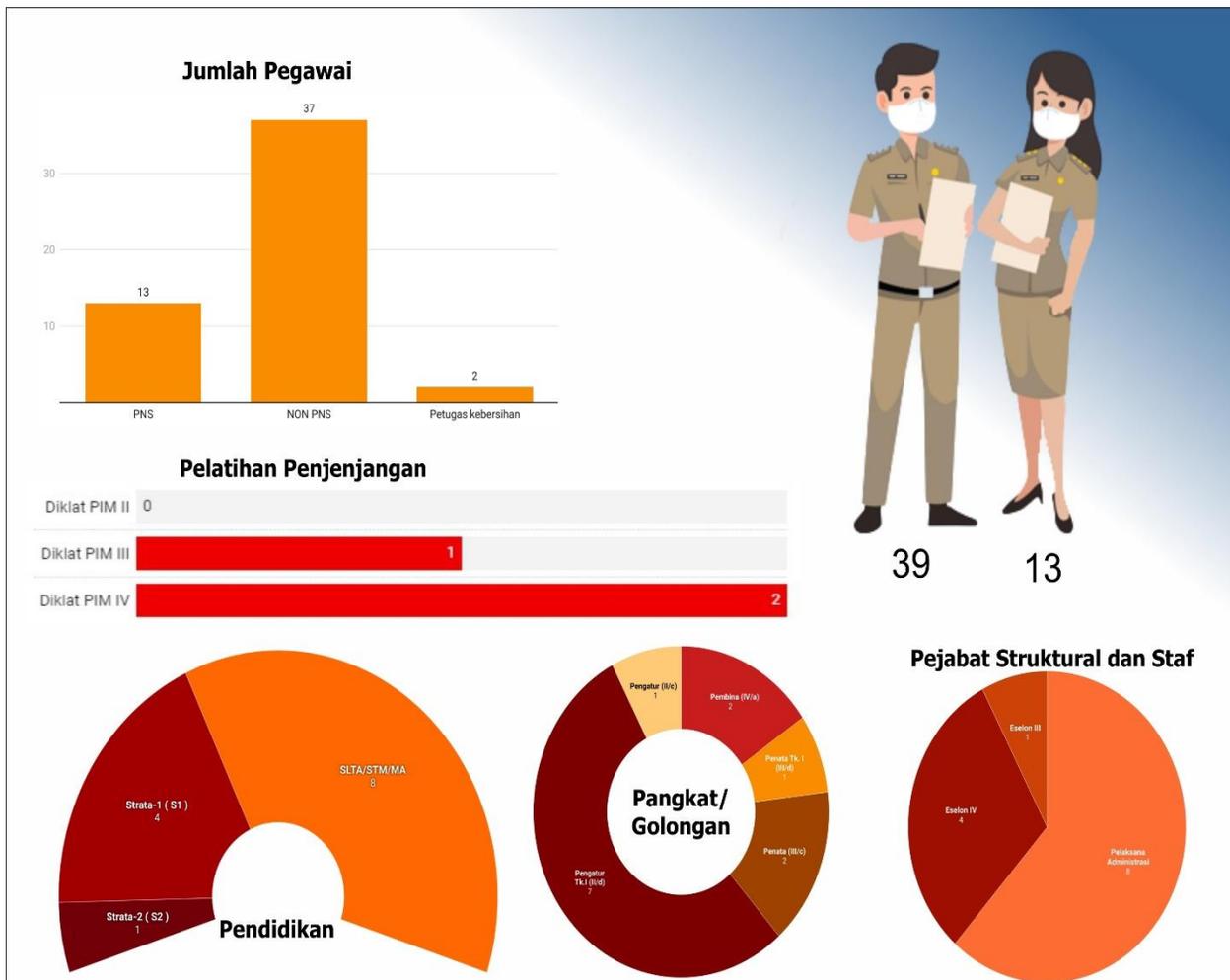
Sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Sumber daya manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Terkait dengan hal tersebut di atas, Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta per 31



Desember 2023 dengan komposisi SDM berdasarkan jumlah pegawai, jenis kelamin, jabatan, golongan, pendidikan dan disajikan dalam **Gambar 1.2**.

Gambar 1.2 Komposisi SDM BPBD Kabupaten Purwakarta



Sumber: Diolah dari data kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

Berdasarkan **Gambar 1.2**, komposisi SDM terbagi menjadi beberapa kategori seperti jumlah pegawai, pejabat struktural dan staf, pangkat/golongan, pendidikan, dan pelatihan penjurangan. Rincian pegawai berdasarkan jumlah pegawai, pejabat struktural dan staf, pangkat/golongan, pendidikan, dan pelatihan penjurangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta

NO	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	PNS	8	5	13	25
2	NON PNS	30	7	37	71.15
3	Petugas kebersihan	2	0	2	3.85
TOTAL		40	12	52	100.00

Sumber: Data diolah dari kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta. 2023

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf**

NO	JABATAN/STAF	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	0	0	0	0
2	Eselon III	1	0	1	8.33
3	Eselon IV	3	1	4	33.33
4	Pelaksana Administrasi	4	4	8	61.54
TOTAL		8	5	13	100.00

Sumber: Data diolah dari kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta. 2023

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Pembina (IV/a)	1	1	2	15
2	Penata Tk. I (III/d)	1	0	1	7.69
3	Penata (III/c)	2	0	2	15.38
4	Pengatur Tk.I (II/d)	4	3	7	53.85
5	Pengatur (II/c)	0	1	1	7.69
TOTAL		8	5	13	100.00

Sumber: Data diolah dari kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta. 2023

**Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Strata-2 (S2)	0	1	1	8
2	Strata-1 (S1)	4	0	4	30.77
3	Sarjana Muda/ D3	0	0	0	0
4	SLTA/STM/MA	4	4	8	61.54
5	SLTP/MTs	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
TOTAL		8	5	13	100.00

Sumber: Data diolah dari kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta. 2023

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pelatihan Penjenjangan

NO	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Diklat PIM II	0	0	0	0
2	Diklat PIM III	1	0	1	33.33
3	Diklat PIM IV	1	1	2	66.67
TOTAL		2	1	3	100.00

Sumber: Data diolah dari kepegawaian Sekertariat BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

1.5 ASPEK STRATEGIS BPBD KABUPATEN PURWAKARTA

Dari Tujuan dan Sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun, dalam perwujudannya di perlukan langkah operasionalnya yang dituangkan kedalam program dan kegiatan tahunan dengan tetap mempertimbangkan keselarasan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

A. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BPBD Kabupaten Purwakarta telah mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada identifikasi permasalahan dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat cukup banyak memiliki daerah yang rentan ancaman bencana alam, Wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah yang terkecil kabupaten/kota di Jawa Barat dengan luas wilayah 97.172 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 1.036.768 orang (Disdukcapil, 2023) termasuk daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada pada lokasi perlintasan jalur tol Cipularang yang menghubungkan Ibu Kota Negara Jakarta dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat Bandung, pembangunan jalur Kereta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten Purwakarta, dan Tol Cipali yang menghubungkan Ibu Kota Negara Jakarta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seiring perkembangan dan kebijakan kepala daerah kabupaten Purwakarta berubah menjadi daerah destinasi wisata dan industri yang cukup signifikan sehingga penambahan penduduk, urbanisasi yang semakin meningkat, dan bahan kimia B2 dan CS2 yang menyebabkan permasalahan lingkungan kepadatan penduduk di daerah-daerah industri yang dikhawatirkan memicu potensi ancaman

bencana baik alam maupun non alam. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Belum optimalnya kualitas penunjang urusan pemerintah Kabupaten Purwakarta	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketetapan penyelesaian pekerjaan. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia seiring keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta.
2.	Belum optimalnya Ketahanan daerah Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya sinergitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Purwakarta. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana. Belum optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber: Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, maka isu strategis yang perlu ditangani BPBD Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM.
2. Penguatan kepedulian dan partisipatif masyarakat terhadap bencana.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.
4. Peningkatan fungsi koordinasi dengan stakeholder terkait baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

B. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Purwakarta instrumen

penting dalam mewujudkan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah tertuang pada Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Purwakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Program sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

C. KEGIATAN

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi sehingga kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- a) Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b) Kegiatan Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

D. ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD sebagian besar dari APBD Kabupaten Purwakarta, Rincian Anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar 6.416.900.064,-. Pada tahun 2023, terjadi perubahan anggaran BPBD Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya sebesar 6.266.900.064,- menjadi 6.416.900.064,- dengan kenaikan sebesar 150.000.000,-. Anggaran tersebut guna membiayai 2 Program dengan rincian anggaran dapat dilihat pada **Tabel 1.7**.

Tabel 1.7
Rincian Anggaran Program

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.982.049.608
Program Penanggulangan Bencana	1.434.850.456
JUMLAH ANGGARAN	6.416.900.064

Sumber: data diolah dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah ditentukan uraian program dan kegiatan Nomenklatur urusan Kabupaten/kota. Sesuai dengan aturan tersebut rincian anggaran program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 1.8**.

Tabel 1.8
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN		
				BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.366.675.358	615.374.250	4.982.049.608
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.090.600		53.090.600
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.849.918.950		1.849.918.950



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN		
				BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.769.100		15.769.100
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.798.800		186.798.800
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.426.368		351.426.368
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.850.000	615.374.250	675.224.250
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.571.419.240		1.571.419.240
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.402.300		278.402.300
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.234.596.506	200.253.950	1.434.850.456
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	360.942.506	42.235.000	403.177.506
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	508.653.900	158.018.950	666.672.850
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	210.000.100		210.000.100
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	155.000.000		155.000.000

Sumber: data diolah dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023

1.6 PELAYANAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1, Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasar pada jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana, pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; (2) Pelayanan Kesiapsiagaan dan Pencegahan di Daerah Rawan Bencana, dengan indikator capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban Bencana dengan indikator



capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4, dijelaskan bahwa:

1. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. respon cepat darurat bencana;
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

1.7 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Derangkat Daerah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahun organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan menjelaskan secara ringkas mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, komposisi pegawai, aspek strategis organisasi, dan pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Purwakarta.



BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas tentang target kinerja tahun 2018-2023, dan perjanjian kinerja Tahun 2023.



BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, serta akuntabilitas keuangan.



BAB IV Penutup menjelaskan rangkuman capaian sasaran program dan sasaran kegiatan serta rencana atau Langkah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja Tahun 2023.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2018-2023

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 891.1/Kep.03-BPBD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis BPBD. Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu dua tahun kedepan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan Tugas, Pokok, fungsi dan Peran Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian target Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
2. Menjadi Acuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memudahkan Pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan sehingga visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPBD Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkannya. Kemudian dari untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan Misi yang merupakan serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pada BAB I maka visi dan misi BPBD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat **pada Gambar 2.1**.

Gambar 2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Purwakarta



Sumber: BPBD Kabupaten Purwakarta

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Permasalahan dan isu strategis BPBD serta tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 yang menjadi tugas BPBD Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sub urusan bencana. Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dukungan terjadap visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai untuk kedepannya. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra BPBD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 adalah “Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana”.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Sasaran jangka menengah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah dimana perumusannya perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta untuk periode 2018-2023 mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Purwakarta. Merperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan dan isu-isu strategis, serta tujuan yang sudah dikemukakan sebelumnya maka Sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.
- 2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

- 1) Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
- 2) Indikator Ketahanan Daerah (IKD).

Keberhasilan dalam mencapai sasaran-sasaran ini dinilai berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan untuk masing-masing indikator. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	100
		Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	100	100

Sumber: Renstra Tahun 2018-2023 BPBD Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, rencana strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 mencoba mengadopsi program RPJMD Kabupaten Purwakarta yang kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja BPBD Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)			100	100	100	300

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada lampiran I. Selain itu, sesuai dengan tupoksi BPBD Kabupaten Purwakarta harus dapat menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta. Perumusan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan

strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja, maka langkah selanjutnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 2 sasaran strategis yang dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	100
		Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	100	100

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

C. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan itu sendiri yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Secara singkat, indikator kinerja adalah alat ukur spesifikasi secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memasukan proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun, dalam perwujudannya di perlukan langkah operasionalnya yang dituangkan kedalam program dan kegiatan tahunan dengan tetap mempertimbangkan keselarasan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan dan mendukung tercapainya sasaran program dan sasaran strategis, BPBD Kabupaten Purwakarta telah menetapkan sasaran kegiatan dan masing-masing indikatornya. Uraian

indikator kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta terdiri dari 2 program dan 12 kegiatan yang dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatkan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

Sumber: Data diolah dari BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian Kinerja adalah perjanjian yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta dengan tujuan untuk menetapkan target kinerja dan pencapaian dalam periode tertentu. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 yang merupakan bentuk perjanjian antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta pada tanggal 03 Januari 2023. Tapkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya. Indikator Perjanjian Kinerja (Tapkin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

Sumber: TAPKIN BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Selanjutnya penurunan Tapkin BPBD Kabupaten Purwakarta, dalam pelaksanaannya dibuatkan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik, dan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran II dokumen ini.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan LAKIP BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini didasarkan kepada Pencapaian target indikator pertahunnya dengan pelaksanaan Strategis Rencana program dan kegiatan prioritas yang mendukung indikator prioritas Kinerja pada Tahun 2023 yang telah ditetapkan dari awal RPJMD hingga akhir RPJMD Bupati terpilih. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas untuk memudahkan terwujudnya Organisasi yang akuntabel, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja perlu dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menghitung pencapaian Indikator Kinerja dengan cara menyelaskan antara program dan kegiatan pendukung indikator kinerja prioritas BPBD pertahunnya.

Perhitungan kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Secara singkat, kinerja merupakan suatu hasil kegiatan atau hasil program sehingga kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *ouput* kegiatan dan *outcome* program. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks rata-rata, angka dan jumlah. Persentase capaian target dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pencapaian target sehingga menunjukkan tingkat capaian yang semakin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam penetapan kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian \%} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil capaian tersebut kemudian di interprestasikan kedalam Skala Nilai peringkat Kinerja, yang dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Skala Nilai peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

A. RINGKASAN KINERJA

BPBD Kabupaten Purwakarta memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Capaian IKU BPBD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	persen	100	97.81	97.81	Sangat Tinggi

Sumber: Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dengan indikator sasaran Indeks ketahanan daerah (IKD), menunjukkan bahwa Realisasi/Capaian IKU BPBD Kabupaten Purwakarta sebesar 97.81% dan telah mencapai target dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun uraian sasaran strategis BPBD yang menjadi tolak ukur IKU BPBD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

**Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis IKU
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	7
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	89.05	Tinggi
		Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Ringkasan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

**Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6,416,900,064		5,694,785,180	97.81	88.75
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				6,416,900,064		5,694,785,180	97.81	88.75
Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4,982,049,608		4,436,452,580		89.05
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B			B	100	
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100			100	89.05	
Indeks ketahanan daerah (IKD)	Program Penanggulangan Bencana				1,434,850,456		1,258,332,600		87.7
		1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100			100	100	
		2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100			100	100	
		3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100			100	100	

Sumber: Data diolah dari RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta

Rata-rata capaian kinerja (%) : **97,81**
 Predikat kinerja : **SANGAT TINGGI**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. pencapaian kinerja difokuskan pada indikator yang mendorong capaian program perangkat daerah;
2. pagu anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendorong capaian program;
3. pandemi covid-19 sudah melandai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali normal;

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi;
2. Penyusunan perencanaan dan pagu anggaran masih belum optimal;
3. waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

1. memanfaatkan sumber daya yang ada atau menggunakan jasa pihak ketiga;
2. melakukan pergeseran anggaran atau menambah pagu anggaran di perubahan;
3. mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan, agar capaian target dapat dilaksanakan;

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

1. tetap difokuskan pelaksanaan kegiatan yang mendorong capaian kinerja program perangkat daerah;
2. lebih mematangkan perencanaan dan anggaran kegiatan ditahun perencanaan mendatang;
3. menyediakan kebutuhan SDM yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja;

Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran III dokumen ini. Ringkasan Evaluasi Renja BPBD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

**Tabel 3.5 Ringkasan Evaluasi Renja
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	
						Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	89.05	89%	menggunakan data berdasarkan realisasi keuangan definitif
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100%	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	
1	5	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	100%	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17	100%	
1	5	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	3	100%	
1	5	1	2,03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%	
1	5	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	5	100%	
1	5	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	60	100%	
1	5	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100%	
1	5	1	2,05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	100%	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100%	
1	5	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	100%	
1	5	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	100%	
1	5	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	
1	5	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100%	
1	5	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	100%	
1	5	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100%	
1	5	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	36	100%	
1	5	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	
1	5	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	5	100%	
1	5	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	100%	
1	5	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	25	100%	
1	5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	21	100%	
1	5	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	14	100%	
1	5	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	7	100%	
1	5	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100%	
1	5	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100%	
1	5	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	
1	5	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%	
1	5	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	0	0%	
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100%	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	100%	
1	5	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	100%	
1	5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100%	
1	5	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	100%	
1	5	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	14	100%	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana;	100	100	100%	SPM
						Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	100	100	100%	SPM
						Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100%	SPM
1	5	3	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2	2	100%	
1	5	3	2,01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	1	100%	
1	5	3	2,01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	250	300	120%	
1	5	3	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6	6	100%	
1	5	3	2,02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50	77	154%	
1	5	3	2,02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	5	100%	
1	5	3	2,02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	54	108%	
1	5	3	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50	50	100%	
1	5	3	2,02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	68	136%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5	5	100%	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1	2	200%	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	12002	24004%	
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	105	105%	
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	1	100%	
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan	1	1	100%	
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3	3	100%	
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	1	100%	
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	1	100%	
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	1	100%	

Sumber: Data diolah dari Renja BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

B. URAIAN KINERJA

Realisasi kinerja Tahun 2023 berdasarkan sasaran program atau sasaran kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dapat diuraikan sebagai berikut:



Sasaran Program Kegiatan I

Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program kegiatan meningkatkan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota diukur menggunakan 2 Indikator Kinerja Program (*outcome*) pada RKPDP BPBD Kabupaten Purwakarta dengan predikat kinerja sebagaimana pada **Tabel 3.6**.

**Tabel 3.6 Realisasi Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (PARSIAL 4)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4,982,049,608		4,436,452,580
	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B	
	2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100		89.05	

Sumber: Data diolah dari RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Capaian SAKIP telah mencapai 100% sedangkan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran mencapai 89.05%. Sasaran Program Kegiatan I Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan atas 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah diukur melalui Perencanaan, Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran diukur dengan tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Sasaran Program Kegiatan II

Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sasaran program kegiatan meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana diukur menggunakan 4 (empat) indikator SPM Sub Urusan Bencana dengan capaian rata-rata 100% sebagaimana pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Realisasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2023

Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	2,301	2,301	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	0	100.00 %
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1,029,561	1,029,561	0	100.00 %
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	2,301	2,301	0	100.00 %
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	56	56	0	100.00 %

Sumber: SPM BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Uraian capaian kinerja atas 4 (empat) indikator kinerja meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana diukur dengan adanya dokumen Kajian Risiko Bencana sebanyak 1 (satu) dokumen yang berdasarkan analisis risiko dan kejadian bencana di Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya, serta telah memiliki legalitas yang sah yang ditetapkan melalui Perbup Bupati.
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana diukur dengan jumlah seluruh penduduk yang menempati daerah rawan bencana dengan kategori kelas risiko rendah, sedang dan tinggi yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun berjalan.
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana diukur dengan jumlah sumber daya manusia yang mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan, Apel Besar Destana dalam rangka Antisipasi Bencana Kekeringan dan Karhutla, serta Sosialisasi

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Daerah Rawan Bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Purwakarta pada desa-desa yang memiliki risiko tinggi berdasarkan KRB BPBD Kabupaten Purwakarta.

4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana diukur dengan adanya rambu dan papan informasi publik yang akan dan telah dipasang. Pemasangan papan informasi public per jenis bencana dilakukan oleh BPBD bersamaan dengan dilakukannya kegiatan KIE ke desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan KRB BPBD kabupaten Purwakarta. Pengadaan rambu evakuasi dilakukan pada akhir tahun dan akan di lakukan pemasangan pada tahun selanjutnya.



Sasaran Program Kegiatan III

Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sasaran program kegiatan meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diukur menggunakan 2 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan capaian rata-rata 100% sebagaimana pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8 Realisasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	517	517	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	245	245	0	100.00 %
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	272	272	0	100.00 %

Sumber: SPM BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Uraian capaian kinerja meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sebagai berikut:

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana diukur dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di BPBD termasuk pengadaan dan mutasi/hibah yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Purwakarta untuk menunjang penanggulangan Bencana.
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) diukur dengan jumlah sumber daya manusia yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Purwakarta 2023, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dan Simulasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Sebagai Respon Terhadap Potensi Bencana Tahun 2023.



Sasaran Program Kegiatan VI

Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran program kegiatan meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diukur menggunakan 5 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan capaian rata-rata 100% sebagaimana pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Realisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2023

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	Ya Terjadi Bencana			
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	25,868	25,868	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100.00 %
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	25,868	25,868	0	100.00 %
3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	485	485	0	100.00 %
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	9	9	0	100.00 %
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	25,868	25,868	0	100.00 %

Sumber: SPM BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Uraian capaian kinerja atas 5 (lima) indikator kinerja meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah sebagai berikut:

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana diukur dengan adanya mengaktifkan sistem komando untuk penanganan darurat bencana. Pada Tahun 2023 tidak terjadi status tanggap darurat bencana, namun terjadi status siaga bencana hidrometeorologi yang kemudian dibuat aktivasi pos komando untuk mengantisipasi kejadian bencana akibat banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana diukur dengan jumlah sumber daya manusia yang terkena atau menjadi korban bencana selama Tahun 2023.
3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana diukur dengan jumlah kejadian bencana selama Tahun 2023 termasuk kegiatan respon cepat TRC terhadap kejadian bencana.
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas diukur dengan jumlah respon cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB) / wabah Zoonosis prioritas yang terjadi selama Tahun 2023.
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana diukur dengan jumlah warga yang terkena atau menjadi korban bencana selama Tahun 2023.

3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Perbandingan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Purwakarta.

A. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Nihil	Nihil	Nihil	99,31	97.81

Sumber: Data diolah oleh BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta berdiri sendiri sebagai OPD Tipe B, yang sebelumnya bersatu dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Maka dari itu, data realisasi BPBD Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya baru tersedia di tahun 2022 sampai 2023.

B. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta belum dapat terukur dikarenakan indikator kinerja baru tersedia dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018 - 2023. Berdasarkan hal tersebut perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023 BPBD Kabupaten Purwakarta dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	-	-	100	100	100	-	-	-	100	1000

Sumber: data diolah dari BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL

Standar Nasional memiliki perhitungan yang berbeda dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, BPBD Kabupaten Purwakarta menggunakan perhitungan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pembanding realisasi kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta dengan Standar Nasional. Perbandingan Capaian Kinerja BPBD dengan Standar Nasional dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian
		BPBD Kabupaten Purwakarta	Nasional	BPBD Kabupaten Purwakarta
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

Sumber: data dari Renstra BPBD Purwakarta Tahun 2018-2023 dan diolah, 2023

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Berdasarkan data pada Bab I, Jumlah PNS di BPBD Kabupaten Purwakarta sebanyak 13 orang, Non PNS 37 orang, dan Petugas Kebersihan 2 Orang sehingga terdapat beberapa kesulitan untuk mencapai target kinerja BPBD Kabupaten Purwakarta. Meskipun begitu, untuk memenuhi kurangnya sumber daya manusia terutama PNS yang terdapat di BPBD Kabupaten Purwakarta, BPBD Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Purwakarta menjadi waspada terhadap risiko bencana. Selain itu, BPBD Kabupaten Purwakarta juga membentuk Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana dan membantu menginformasikan kejadian bencana yang terdapat didaerahnya. Jumlah keseluruhan Relawan Destana sebanyak 2.196 orang yang terdiri dari 183 Desa di 17 Kecamatan. Uraian jumlah Destana di setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13
Data Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH RELAWAN DESTANA
1	WANAYASA	15	180
2	JATILUHUR	10	120
3	BUNGURSARI	10	120
4	MANIIS	8	96
5	PONDOKSALAM	11	132
6	BABAKANCIKAO	9	108
7	KIARAPEDES	10	120
8	CIBATU	10	120
9	SUKASARI	5	60
10	TEGALWARU	13	156
11	PLERED	16	192
12	DARANGDAN	15	180
13	SUKATANI	14	168
14	BOJONG	14	168
15	PASAWAHAN	12	144
16	PURWAKARTA	1	12
17	CAMPAKA	10	120
TOTAL		183	2.196

Sumber: data diolah oleh BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas SDM demi mengurangi risiko bencana. Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah sebuah program atau inisiatif yang bertujuan untuk membangun ketahanan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat desa. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Secara umum, tujuan dari program Destana yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Purwakarta adalah untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi bencana melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, sosialisasi tentang penanggulangan bencana, dan pembentukan mekanisme koordinasi serta evakuasi dalam menghadapi situasi darurat. Dengan adanya program Destana yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Purwakarta, diharapkan masyarakat desa dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana, sehingga risiko terjadinya kerugian jiwa dan kerusakan harta benda dapat diminimalkan.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebesar Rp5,694,785,180,00 atau terserap 88,75% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp6.416.900.064,00. Rincian anggaran dan realisasi keuangan BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Belanja Pegawai	1.835.002.350,00	1.616.588.692,00	88,10
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.766.269.514,00	3.338.510.488,00	88,64
3.	Belanja Modal	815.628.200,00	739.686.000,00	90,69
Jumlah		6.416.900.064,00	5.694.785.180,00	88,75

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas total belanja operasi pada anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.5.601.271.864,00, sedangkan realisasi belanja operasi Tahun 2023 sebesar Rp.4.955.099.180,00 sehingga anggaran yang terserap sebanyak 88,46%. Belanja modal dengan rincian Belanja Peralatan dan Mesin pada anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.815.628.200,00, sedangkan realisasi sebesar Rp.739.686.000,00 terserap sebanyak 90,69%. Rincian anggaran dan realisasi keuangan berdasarkan sasaran program, dan sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.982.049.608,00	4.436.452.580,00	89,05
2.	Program Penanggulangan Bencana	1.434.850.456,00	1.258.332.600,00	87,70
JUMLAH TOTAL		6.416.900.064,00	5.694.785.180,00	88,75

Sumber: Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan, 2023

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Keuangan
Berdasarkan Kegiatan Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Rencana		Realisasi		Selisih (+/-)	Persentase (%)	Ket.
		Target	Anggaran	Target	Anggaran			
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100	6.416.900.064	100	5,694,785,180	722.114.884	88,75%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	4.982.049.608	100	4.436.452.580	545.597.028	89,05%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2	13.394.800	2	13.394.800	0	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	1	6.553.300	1	6.533.300	20.000	99,69%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	4.978.100	1	4.978.100	0	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	11.544.000	1	11.544.000	0	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	16.620.400	2	15.760.400	860.000	94,83%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17	1.835.002.350	17	1.616.588.692	218.413.658	88,10	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	4.997.800	1	4.997.800		100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.951.900	1	4.951.900	0	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	4.966.900	1	4.966.900	0	100%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	4.883.200	1	4.220.000	663.200	86,42%	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	3.150.000	1	1.770.000	1.380.000	56,19%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	7.735.900	1	5.620.000	2.115.900	72,65%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	124.820.000	5	124.665.800	154.200	99,88%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	2.999.900	1	2.993.000	6.900	99,77%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	2.980.000	12	1.860.000	1.120.000	62,42%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5.998.900	1	4.618.900	1.380.000	76,99%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	50.000.000	5	9.500.000	40.500.000	19,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi	1	29.986.500	1	29.928.500	58.000	99,81%	



No.	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Rencana		Realisasi		Selisih (+/-)	Persentase (%)	Ket.
		Target	Anggaran	Target	Anggaran			
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	16.119.000	1	16.000.000	119.000	99,26%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	92.418.118	5	64.712.100	27.706.018	70,02%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	17.902.750	2	17.900.000	2.750	99,98%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35	20.000.000	35	19.300.000	700.000	96,50%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	175.000.000	12	173.756.543	1.243.457	99,29%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	402.230.000	1	342.380.000	59.850.000	85,12%	
	Pengadaan Mebel	25	26.598.000	25	26.570.000	28.000	99,89%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21	46.867.200	21	46.435.000	432.200	99,08%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	141.893.750	14	141.815.000	78.750	99,94%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	57.635.300	7	57.325.000	310.300	99,46%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.500.000	1	2.500.000	0	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	76.101.000	12	56.268.079	19.832.921	73,94%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1.492.818.240	12	1.334.886.135	157.932.105	89,42%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	17.000.000	1	15.000.000	2.000.000	88,24%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	147.688.700	9	141.885.890	5.802.810	96,07%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	3.090.400	1	1.155.741	1.934.659	37,40%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	99.823.200	2	99.711.000	112.200	99,89%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	2.440.000	4	2.440.000	0	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	8.360.000	14	7.520.000	840.000	89,95%	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100	1.434.850.456	100	1.258.332.600	176.517.856	87.70%	



No.	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Rencana		Realisasi		Selisih (+/-)	Persentase (%)	Ket.
		Target	Anggaran	Target	Anggaran			
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	175.000.000	1	172.383.000	2.617.000	98,50%	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	250	228.177.506	300	183.399.650	44.777.856	80,38%	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50	75.000.000	77	74.900.000	100.000	99,87%	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5	431.672.850	5	382.278.300	49.394.550	88,56%	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50	60.000.000	54	59.900.000	100.000	99,83%	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50	50.000.000	50	0	50.000.000	0%	di utangkan
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	50.000.000	68	49.985.000	15.000	99,97%	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	15.000.000	1	14.620.000	380.000	97,47%	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50	15.000.100	50	14.999.900	200	100%	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	150.000.000	100	140.513.100	9.486.900	93,68%	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	15.000.000	1	15.000.000	0	100,00%	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	1	15.000.000	1	11.060.000	3.940.000	73,73%	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	75.000.000	1	74.582.500	417.500	99,44%	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	50.000.000	1	49.922.250	77.750	99,84%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	30.000.000	1	14.788.900	15.211.100	49,30%	

Sumber: Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Sub Kegiatan, 2023

Rincian realisasi anggaran/keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran IV dokumen ini.



BAB VI PENUTUP

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2023 telah melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pada sub urusan Bencana. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 4.1** dan **Tabel 4.2**.

**Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	persen	100	97,81	97,81	Sangat Tinggi

Sumber: data diolah oleh BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

**Tabel 4.2 Capaian Sasaran Strategis IKU
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	7
Mewujudkan Purwakarta Aman dari Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	89.05	Tinggi
		Mingkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Persen	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terlepas dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi landasan atau faktor penentu dalam mencapai tujuan tersebut. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja suatu organisasi, unit, atau program dalam mencapai tujuan akhirnya. Ringkasan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

**Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatkan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	89.05%	89.05%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			100%	97.81%	97.81%

Sumber: data diolah oleh BPBD Kabupaten Purwakarta, 2023

Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara teknis atau operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, sesuai dengan indikator kinerja sebagai terjemahan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana dengan sasaran Meningkatnya Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase pelayanan informasi rawan bencana 100%.
2. Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%.
3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%.



Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tercapai 100% pada Tahun 2023. Sedangkan capaian kinerja secara manajemen terutama pada Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran hanya mencapai 89.05%.

4.1. PERMASALAHAN

Pada realisasi Akuntabilitas Keuangan pada Tahun 2023, terdapat permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi yaitu adanya beberapa kegiatan yang diutangkan. Jumlah utang yang harus dibayar sebesar Rp.172.218.590,- dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- namun yang terhutang sebesar Rp.49.900.000,-
- 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana/Belanja Modal Rambu Tidak Bersuara) sebesar Rp.42.105.000,-
- 3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering, Alat Penyelamatan, dan Alat Keselamatan Kerja) sebesar Rp.32.585.000,-
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor/Belanja Alat Bahan (Kegiatan Kantor Bahan Komputer dan Kertas/Cover) sebesar Rp.23.869.200,-
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) sebesar Rp.23.759.390,-

4.2. SOLUSI

Tahun 2023 merupakan tahun kedua keberadaan BPBD Kabupaten Purwakarta sehingga dari segi Tata Kelola baik keuangan maupun administrasi masih banyak yang harus dibenahi hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia yang masih relatif sedikit sehingga pendelegasian wewenang dan rentang kendali yang masih sedikit. Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD-OPD terkait yang dapat membantu pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai baik melalui diklat/bimtek, pengembangan kapasitas, pelatihan maupun workshop.
3. Mengajukan usulan kebutuhan pegawai ke OPD pengampu Kepegawaian.

LAMPIRAN

Lampiran I

INDIKATOR KINERJA BPBD KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah			B Opini	B Opini	B Opini
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Asministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Asministrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD Kabupaten Purwakarta					



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	100%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pada BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana BPBD Kabupaten Purwakarta					
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Lampiran II

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUDDY HERDIANA S, S.IP.,M.M**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANNE RATNA MUSTIKA**
Jabatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Pihak Pertama

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JUDDY HERDIANA S. S.IP.,M.M
Pembia Tk.I (IV/b)
NIP. 19720128 199101 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantor	B 100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.837.049.608	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.429.850.456	APBD

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Pihak Pertama

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JUDDY HERDIANA S. S.IP., M.M
Pembia Tk.I (IV/b)
NIP. 19720128 199101 1 001

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIS BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan
7.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
10.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
11.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
12.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
13.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket
14.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
15.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
16.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
17.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah			



NO	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
18.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
19.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
20.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
21.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
22.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
24.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
25.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit
26.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit
27.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit
28.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
30.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
31.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
32.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
33.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
34.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
35.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
36.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
37.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit

Sumber: Cascading BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	250 Orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang
4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit
5.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen
6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang
7.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang
8.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga

Sumber: Cascading BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
5.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen

Sumber: Cascading BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



INDIKATOR KINERJA KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen
2.	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0
3.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan

Sumber: Cascading BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



Lampiran III

HASIL RKPD BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6,416,900,064		582,246,228		2,523,493,158		3,566,546,383		5,694,785,180		5,694,785,180	97.81	88.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				6,416,900,064		582,246,228		2,523,493,158		3,566,546,383		5,694,785,180		5,694,785,180	97.81	88.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4,982,049,608		582,246,228		2,174,698,208		3,087,811,433		4,436,452,580		4,436,452,580		89.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B			B		B		B		B		B	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100			11.69		43.65		61.98		89.05		89.05		89.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TINGGI
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana				1,434,850,456		0		348,794,950		478,734,950		1,258,332,600		1,258,332,600		87.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100			5		76.4		95		100		100		100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI
		2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100			0		38.55		100		100		100		100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI
		3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100			95.85		95.98		96		100		100		100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI

Sumber: RKPD BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



EVALUASI RENJA BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pertriwulan					Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan				
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	5	1	2.01											
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	B	B	B	B	B	B				
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100	11.69	43.65	61.98	89.05	89.05	89%	menggunakan data berdasarkan realisasi keuangan definitif			
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	0	2	3	5	5	100%		
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2			2	2	100%		
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1			1	1	100%		
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1		1	100%		
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1		1	100%		
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		2		2	100%		
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	1	3	4		4	100%	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17			17	100%		
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1		1			1	100%	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1			1		1	100%	
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1		1			1	100%	
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3			3	3	100%		
1	5	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1			1	1	100%		
1	5	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1			1	1	100%		
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1			1	1	100%		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pertriwulan					Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	1	3	4	5	5	100%	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60		60			60	100%	
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		1			1	100%	
1	5	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	3	6	9	12	12	100%	
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1				1	1	100%	
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5			1	5	5	100%	
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6		6	6	6	6	100%	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		1			1	100%	
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		1			1	100%	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5		3	4	5	5	100%	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2		2			2	100%	
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36		10	22	36	36	100%	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	6	9	12	12	100%	
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5		2		5	5	100%	
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1				1	1	100%	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25				25	25	100%	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21				21	21	100%	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14		14			14	100%	
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7		7			7	100%	
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2	3	3	3	3	100%	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		1			1	100%	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	6	9	12	12	100%	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	6	9	12	12	100%	
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6					0	0%	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pertriwulan					Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		1			1	100%	
1	5	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9		3		9	9	100%	
1	5	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1			1		1	100%	
1	5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2			2		2	100%	
1	5	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4				4	4	100%	
1	5	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14		10	12	14	14	100%	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana;	100	5	76.40	95	100	100	100%	SPM
						Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	100	0	38.55	100	100	100	100%	SPM
						Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	95.85	95.98	96	100	100	100%	SPM
1	5	3	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2			1	2	2	100%	
1	5	3	2,01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1				1	1	100%	
1	5	3	2,01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	250			300		300	120%	
1	5	3	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6		1	3	6	6	100%	
1	5	3	2,02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50			77		77	154%	
1	5	3	2,02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5		5			5	100%	
1	5	3	2,02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50				54	54	108%	
1	5	3	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50				50	50	100%	
1	5	3	2,02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50			68		68	136%	
1	5	3	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5	2	4	4	5	5	100%	
1	5	3	2,03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1		1	2		2	200%	



Kode					Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pertriwulan					Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	Keterangan
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	5	3	2,03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	234	1916	11221	12002	12002	24004%	
1	5	3	2,03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	10	70	88	105	105	105%	
1	5	3	2,03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1				1	1	100%	
1	5	3	2,03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan	1		1			1	100%	
1	5	3	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3	0	0	1	2	3	100%	
1	5	3	2,04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1				1	1	100%	
1	5	3	2,04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1				1	1	100%	
1	5	3	2,04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1			1		1	100%	

Sumber: Renja BPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan diolah, 2023



Lampiran IV

REALISASI ANGGARAN BPBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 (PERBULAN)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pertriwulan												Total Realisasi	Keterangan				
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19				
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta	6,416,900,064	122,815,151	229,410,595	230,020,482	669,515,153	805,157,822	463,933,155	206,540,678	371,233,542	475,355,996	254,567,039	436,163,579	1,430,071,988	5,694,785,180					
1	5	1	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,982,049,608	122,815,151	229,410,595	230,020,482	404,788,103	731,593,722	456,070,155	206,540,678	369,969,142	346,642,996	248,259,039	302,986,729	787,355,788	4,436,452,580	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,090,600	-	-	-	-	6,796,000	5,938,100	-	7,676,000	11,872,400	-	3,120,000	16,808,100	52,210,600	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,394,800											3,120,000	10,274,800	13,394,800	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,553,300												6,533,300	6,533,300	
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,978,100						2,818,100		2,160,000					4,978,100	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,544,000					6,796,000	3,120,000		1,628,000					11,544,000	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,620,400								3,888,000	11,872,400				15,760,400	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,849,918,950	122,815,151	122,293,419	122,212,106	144,534,875	192,195,134	191,388,953	105,284,079	122,495,594	124,381,513	126,099,148	129,890,470	127,914,850	1,631,505,292	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,835,002,350	122,815,151	122,293,419	122,212,106	144,534,875	189,317,334	188,042,053	105,284,079	119,255,594	120,623,613	126,099,148	128,196,470	127,914,850	1,616,588,692	
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4,997,800					2,877,800			1,620,000			500,000		4,997,800	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,951,900									3,757,900		1,194,000		4,951,900	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pertriwulan												Total Realisasi	Keterangan
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
1 5 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	4,966,900						3,346,900		1,620,000					4,966,900	
1 5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,769,100	-	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	-	-	9,210,000	11,610,000	
1 5 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,883,200												4,220,000	4,220,000	
1 5 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3,150,000												1,770,000	1,770,000	
1 5 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,735,900				1,200,000			1,200,000					3,220,000	5,620,000	
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186,798,800	-	-	-	-	125,498,800	2,160,000	-	-	3,380,000	1,080,000	11,518,900	-	143,637,700	
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124,820,000					124,665,800								124,665,800	
1 5 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,999,900					833,000	2,160,000							2,993,000	
1 5 1 2.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,980,000									960,000		900,000		1,860,000	
1 5 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,998,900											4,618,900		4,618,900	
1 5 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000									2,420,000	1,080,000	6,000,000		9,500,000	
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351,426,368	-	-	-	66,325,600	55,748,500	21,521,000	-	18,769,000	62,346,200	8,064,600	40,994,583	47,827,660	321,597,143	
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,986,500					22,093,000	674,000			7,161,500				29,928,500	
1 5 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,119,000				16,000,000									16,000,000	
1 5 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92,418,118				16,052,600	16,504,000	1,500,000		2,080,000	19,321,100	2,080,000	4,240,000	2,934,400	64,712,100	
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,902,750						16,100,000						1,800,000	17,900,000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pertriwulan												Total Realisasi	Keterangan
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
1 5 1 2,06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000					3,800,000	1,300,000		3,600,000	4,800,000			5,800,000	19,300,000	
1 5 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,000,000				34,273,000	13,351,500	1,947,000		13,089,000	31,063,600	5,984,600	36,754,583	37,293,260	173,756,543	
1 5 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675,224,250	-	-	-	-	199,140,000	-	-	-	-	-	-	415,385,000	614,525,000	
1 5 1 2,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402,230,000												342,380,000	342,380,000	
1 5 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	26,598,000												26,570,000	26,570,000	
1 5 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,867,200												46,435,000	46,435,000	
1 5 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141,893,750					141,815,000								141,815,000	
1 5 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57,635,300					57,325,000								57,325,000	
1 5 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,571,419,240	-	107,117,176	107,808,376	181,794,628	114,465,288	213,007,352	345,599	218,142,807	119,362,893	113,015,291	107,462,776	111,132,028	1,393,654,214	
1 5 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000				1,000,000	1,500,000								2,500,000	
1 5 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,101,000				13,331,852	5,156,912	927,400		8,217,256	19,067,292	6,589,316		2,978,051	56,268,079	
1 5 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,492,818,240		107,117,176	107,808,376	167,462,776	107,808,376	212,079,952	345,599	209,925,551	100,295,601	106,425,975	107,462,776	108,153,977	1,334,886,135	
1 5 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278,402,300	-	-	-	10,933,000	37,750,000	22,054,750	99,711,000	2,885,741	25,299,990	-	10,000,000	59,078,150	267,712,631	
1 5 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,000,000					15,000,000								15,000,000	
1 5 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	147,688,700				10,933,000	20,000,000	22,054,750			25,299,990		10,000,000	53,598,150	141,885,890	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pertriwulan												Total Realisasi	Keterangan
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
1 5 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,090,400									1,155,741				1,155,741	
1 5 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,823,200							99,711,000						99,711,000	
1 5 1 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,440,000												2,440,000	2,440,000	
1 5 1 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,360,000					2,750,000				1,730,000				3,040,000	7,520,000
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,434,850,456	-	-	-	264,727,050	73,564,100	7,863,000	-	1,264,400	128,713,000	6,308,000	133,176,850	642,716,200	1,258,332,600	
1 5 3 2,01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	403,177,506	-	-	-	14,709,750	16,781,300	-	-	-	-	-	79,594,600	244,697,000	355,782,650	
1 5 3 2,01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	175,000,000												172,383,000	172,383,000	
1 5 3 2,01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	228,177,506				14,709,750	16,781,300						79,594,600	72,314,000	183,399,650	
1 5 3 2,02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	666,672,850	-	-	-	250,017,300	46,636,000	-	-	-	124,885,000	-	-	145,525,000	567,063,300	
1 5 3 2,02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	75,000,000									74,900,000				74,900,000	
1 5 3 2,02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	431,672,850				250,017,300	46,636,000							85,625,000	382,278,300	
1 5 3 2,02 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	60,000,000												59,900,000	59,900,000	
1 5 3 2,02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50,000,000													-	Utang



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pertriwulan												Total Realisasi	Keterangan
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
1 5 3 2,02 12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50,000,000									49,985,000				49,985,000	
1 5 3 2,03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	210,000,100	-	-	-	-	10,146,800	7,254,500	-	140,000	2,808,000	6,308,000	3,660,000	165,875,700	196,193,000	
1 5 3 2,03 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	15,000,000												14,620,000	14,620,000	
1 5 3 2,03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15,000,100					5,350,000	1,234,500						8,415,400	14,999,900	
1 5 3 2,03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150,000,000					4,796,800	1,520,000		140,000	2,808,000	6,308,000	3,660,000	121,280,300	140,513,100	
1 5 3 2,03 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15,000,000						4,500,000						10,500,000	15,000,000	
1 5 3 2,03 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	15,000,000												11,060,000	11,060,000	
1 5 3 2,04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	155,000,000	-	-	-	-	-	608,500	-	1,124,400	1,020,000	-	49,922,250	86,618,500	139,293,650	
1 5 3 2,04 2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75,000,000												74,582,500	74,582,500	
1 5 3 2,04 4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	50,000,000											49,922,250		49,922,250	
1 5 3 2,04 5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	30,000,000						608,500		1,124,400	1,020,000			12,036,000	14,788,900	
JUMLAH		6,416,900,064	122,815,151	229,410,595	240,953,482	707,265,153	827,212,572	563,644,155	209,426,419	396,533,532	475,355,996	264,567,039	495,241,729	1,697,784,619	5,694,785,180	

